

## Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis *Electronic Government* Melalui Website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023

Aprilia Shafinatuz Zahwa <sup>1\*</sup>; Muradi <sup>2</sup>; Neneng Yani Yuningsih <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia; [apriliazahwa33@gmail.com](mailto:apriliazahwa33@gmail.com)

\*Correspondence : [apriliazahwa33@gmail.com](mailto:apriliazahwa33@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara tahun 2022-2023 berdasarkan tiga elemen sukses pengembangan *e-government* menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara tahun 2022-2023 masih belum dapat memenuhi elemen sukses secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, masih dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Pindang Cemplung sudah dapat dirasakan meski belum secara optimal.

### ABSTRACT

The purpose of this research is to understand, describe, and analyze how e-government-based population administration services through the Pindang Cemplung website in Jepara Regency in 2022-2023 based on three successful elements of e-government development according to the results of studies and research from the Harvard JFK School of Government. The research method used is a qualitative research method with descriptive presentation. Data collection is done through literature study and field study using observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants is done by purposive technique. The results showed that e-government-based population administration services through the Pindang Cemplung website in Jepara Regency in 2022-2023 still could not optimally fulfill the elements of success. Based on the research results, there is still a need for thorough and consistent socialization to the community, competent human resources are needed, and the benefits felt by the community with the existence of Pindang Cemplung can already be felt even though it is not optimal.

### Kata kunci

*E-Government, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pindang Cemplung*

### Keywords

*E-Government, Population Administration Service, Pindang Cemplung*

## Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada bidang pemerintahan. Masyarakat memahami bahwa birokrasi pemerintahan cenderung berbelit dan tidak praktis sehingga kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Pemerintah sebagai pelayan publik dituntut agar mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat beradaptasi dengan hal tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mengenai pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat (Sudirman,2023). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan kemudian dikenal dengan istilah *Electronic Government* atau *E-Government*. *E-government* secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, dengan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam penyampaian layanan (Sudirman & Saidin, 2022).

Pelayanan *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Jepara didasarkan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik. Adapun tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan diatas menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merupakan salah satu dinas yang menciptakan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Inovasi yang dimaksud adalah adanya website bernama Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung). Pindang Cemplung merupakan inovasi baru dalam pelayanan administrasi berbasis *e-government* berupa layanan kependudukan yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas serta efisiensi masyarakat Kabupaten Jepara ketika mengurus urusan kependudukan. Selanjutnya, pengembangan website Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada laman resmi website Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) adalah *Pindang Cemplung (jepara.go.id)* atau <https://pindangcemplung.jepara.go.id/>, beberapa fitur yaitu Home, Pendaftaran Baru, Cek Status Pengajuan, Download, Bantuan, dan Login. Lalu, terdapat beberapa pelayanan yang ditampilkan seperti Akta Lahir Baru, Akta Lahir Terlambat, Akta Kematian, Akta Revisi/Hilang/Rusak, KIA (Kartu Identitas Anak), KTP Elektronik,

Perpindahan Keluar (Surat Pindah Keluar Antar Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Kedatangan (Kedatangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota).

Dalam penerapan serta penyelenggaraan *e-government* Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) tentunya tidak terlepas dari beberapa masalah. Beberapa masalah tersebut seperti adanya keterbatasan verifikator yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil hanya memiliki 10 verifikator padahal hampir semua pengajuan pelayanan di Disdukcapil muaranya yaitu pada verifikator, baik Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung), kerja sama dengan Rumah Sakit, kerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama), dan lain-lain. Artinya jika pengajuan atau permohonan dari masyarakat Kabupaten Jepara banyak kemudian jumlah verifikator sedikit maka akan *overload*. Sedangkan verifikator memiliki kemampuan untuk memverifikasi berkas tiap harinya 30-50 ajuan atau permohonan. Sementara jika ajuan atau permohonan dari masyarakat itu banyak, verifikator akan memiliki penundaan untuk hari selanjutnya.

Kendala lainnya yaitu masyarakat Jepara masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya Pindang Cemplung ini. Terdapat masyarakat yang masih awam dengan penggunaan website atau Gaptek (gagap teknologi). Selain itu yaitu minimnya literasi internet yang cukup artinya belum semua warga dapat mengakses Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) terutama warga yang tidak melek internet, kemudian warga yang tinggal di area *blankspot* yang tidak memiliki layanan internet, dan warga yang tidak memiliki *gadget* yang *support* dengan layanan Pindang Cemplung. Memang tidak semua pelayanan dapat dilakukan secara *online* melalui Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung). Seperti contohnya pembuatan KTP baru dikarenakan pembuatan KTP baru membutuhkan perekaman biometrik yaitu pengambilan foto, sidik jari, dan iris mata. Hal ini tidak bisa dilakukan melalui *online* sehingga masyarakat tetap harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Untuk menambah wawasan tentang pelayanan pemerintahan berbasis *e-government*, beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan referensi, antara lain penelitian oleh Setianingrum, Sumaryadi, dan Wargadinata (2020) yang menemukan bahwa meski sudah ada integrasi sistem informasi di DPMPTSP Kota Bandung, sosialisasi belum merata di masyarakat; penelitian oleh Rizky, Frinaldi, dan Putri (2019) yang menunjukkan kendala pada SDM, dana, dan mindset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam promosi pariwisata melalui website di Kota Padang; penelitian oleh Atthahara (2018) yang menyoroti aplikasi Ogan Lopian di Kabupaten Purwakarta masih membutuhkan pemantapan infrastruktur teknologi dan SDM; penelitian oleh Muliawaty dan Hendrayawan (2020) yang menekankan pentingnya *e-government* untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Kabupaten Sumedang; penelitian oleh Aprianty (2016) di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda yang menunjukkan elemen *support* dan *capacity* yang belum optimal,

dengan kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran serta peralatan; penelitian oleh Pasaribu Humisar Parsaorantua, Yuriewati Pasoreh, dan Sintje A. Rondonuwu (2017) yang menunjukkan bahwa *e-government* memudahkan informasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat; serta penelitian oleh Arif, et al., (2022) yang menilai efektivitas layanan online Sapo Rancak di Kota Padang, yang masih belum optimal karena kendala aksesibilitas, pengaduan, dan kompleksitas penggunaan aplikasi, yang semuanya memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan *e-government* dalam pelayanan publik di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan area yang perlu diperbaiki untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal dan inklusif.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, menggunakan teori yang berbeda yaitu teori *e-government* dari Indrajit terkait elemen sukses penerapan *e-government*, menggunakan teori penerapan *E-Government* menurut Goldschmidt (2002) di dalam Indrajit (2005) di antaranya yaitu *Audience, Content, Interactivity, Usability*, dan *Innovation*, dan menggunakan teori media baru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, akan menggunakan teori Elemen Sukses Pengembangan E-Government yang merupakan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government yang dikutip dari Indrajit (2016) diantaranya elemen *Support, Capacity*, dan *Value*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Support* (Dukungan dari Pemerintah), *Capacity* (Kemampuan atau Keberdayaan dari Pemerintah), dan *Value* (Manfaat) Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis *E-Government* Melalui Website Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) di Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023. Penelitian ini dapat menjadi informasi terbaru bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dan pengayaan kajian khususnya dalam pembahasan mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis *E-Government* Melalui Website Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) di Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023.

## Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran deskripsi secara utuh, menyeluruh, merinci, dan mendetail mengenai sebuah fenomena sosial yang diteliti yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website pindang cemplung di Kabupaten Jepara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik *purposive*. Informan penelitian ini adalah SubKor SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Perencana Ahli Muda/Subkor Pemerintahan BAPPEDA

Kabupaten Jepara, dan masyarakat Kabupaten Jepara sebagai pengguna website Pindang Cemplung. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk melakukan validasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ( Miles & Huberman, 1984)

## Hasil dan Pembahasan

### 1. *Support* (Dukungan)

Kerjasama Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah yaitu keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan sekadar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* dapat berjalan dengan mulus tanpa adanya "*political will*" ini. Hal ini dikarenakan budaya birokrasi cenderung bekerja dengan model manajemen "*top down*" sehingga jelas dukungan implementasi program *e-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang ada pada level sebelum meluas ke level-level di bawahnya.

Suatu hal yang mustahil ketika terdapat inovasi dalam sektor pemerintahan tetapi tidak didukung oleh pemerintah, maka penerapan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e- government* Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Dukungan yang dimaksud adalah:

- a. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses dalam mencapai visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyepakati kerangka *e- government* dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan melalui website Pindang Cemplung merupakan salah satu kunci sukses dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Jepara. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e- government* melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai salah satu kunci sukses dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Jepara. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara menjadi salah satu upaya untuk mencapai visi "madani dan misi nomor 5 (lima) yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Profesional."

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi berupa penjelasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai

penanggung jawab terkait pelaksanaan website Pindang Cemplung terkait disepakatinya kerangka *e-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jepara. Subkor SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

*"Kalau visi misi dari Disdukcapil memang pelayanan kami mudah, murah, apalagi dengan slogan terbaru pelayanan kami melayani dengan sepenuh hati dan berhati-hati prinsip seperti itu menjadi dasar pelayanan sesuai pada visi misi di Kabupaten Jepara. Visi misi Disdukcapil isinya sama dengan visi misi Kabupaten Jepara. Selarasnya pada visi yaitu pada kata "madani" yang artinya yaitu daerah yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, kreatif, tekun, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh aturan yang adil, berpendidikan maju, beradab, aman, nyaman, tentram, sejahtera, bertanggung jawab dan berlandaskan iman dan taqwa. Kalau dari misi secara umum masuk di nomor 5, yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Profesional." (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)*

- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep *e-government* dengan semangat lintas sektoral

Pertama, dialokasikannya sejumlah sumber daya manusia di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep *e-government* melalui website Pindang Cemplung dengan semangat lintas sektoral. Dalam pelaksanaan Pindang Cemplung sudah dialokasikannya sumber daya manusia di perangkat daerah lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung yaitu kerjasama antar Disdukcapil, Diskominfo, dan Disdukcapil juga membentuk tim lainnya pada tingkat kecamatan dan tingkat desa. Perencana Ahli Muda/Subkor Pemerintahan. memberikan penjelasan saat melakukan wawancara dengan peneliti yaitu:

*"Disdukcapil terus membentuk tim baik di tingkat kabupaten, kecamatan, lalu ditindaklanjuti di tingkat desa juga." (Hasil Wawancara, 16 Februari 2024)*

Kemudian dijelaskan juga Subkor SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara bahwa;

*"Secara undang-undang adminduk, secara pelaksana dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika." (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)*

Selanjutnya, dialokasikannya sejumlah sumber daya finansial di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep *e-government* Pindang Cemplung. Dukungan pemerintah sudah sesuai dijabarkan dengan anggaran di *support* anggaran baik dari Bupati dan Sekretaris Daerah. Pertama terkait dengan penyediaan sarana prasarana (pembelian server dan *support* jaringan tiap kecamatan dan desa), sarana prasarana di kantor seperti *computer*, *laptop*, *printer*, dan sumber daya manusia. Kemudian, dialokasikannya sejumlah sumber daya manusia di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep *e-government* Pindang Cemplung. Sesuai yang dijelaskan oleh Kepala

Sub Bag Umum & Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut:

*"Pemerintah daerah khususnya PJ Bupati sangat responsif dengan pelayanan Disdukcapil, karena pelayanan Disdukcapil adalah dasar dalam segala pelayanan. Jadi suatu contoh ketika hendak mendaftar sekolah pertama kali yang ditanya adalah namanya siapa. Untuk mendapatkan nama yaitu tentunya harus memiliki akta kelahiran, KTP, dan KK. Kemudian untuk SDM memanfaatkan SDM yang ada. Untuk SDM yang ASN terlalu minim sekali. Artinya kita memanfaatkan tenaga harian lepas (THL) yang mana di front office ini hampir semua adalah tenaga harian lepas semua. Jadi kalau kita tidak boleh merekrut THL baru memang jujur saja kita kerepotan. Dukungan dari PJ Bupati diizinkan untuk merekrut THL yang kompeten. Sebagian besar ahli IT yang mana setiap harinya memonitor lewat Whatsapp. Pindang Cemplung sebagai upaya kita memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan." (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)*

PJ Bupati Jepara sangat responsif dengan dialokasikannya sejumlah sumber daya manusia di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep *e-government* Pindang Cemplung dalam pelayanan Disdukcapil, akan tetapi dalam sumber daya manusia ASN (Aparatur Sipil Negara) masih kurang dan kemudian memanfaatkan THL (Tenaga Harian Lepas) atas seizin PJ Bupati asal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan memiliki keahlian di bidang informatika.

c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government*

Aspek dukungan ketiga yaitu dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas). Untuk itu, diperlukan perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah yang jelas mengatur berjalannya pelaksanaan *e-government* yang baik dan sesuai dengan mekanisme yang kondusif. Dasar hukum diciptakannya inovasi website Pindang Cemplung yaitu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dibangunnya infrastruktur dan superstruktur dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung sudah terlaksana dengan baik karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyediakan berbagai infrastruktur dan sudah terdapat peraturan sebagai dasar hukum pembuatan dan penyelenggaraan dari Pindang Cemplung.

d. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum

Sosialisasi harus terus dilakukan secara aktif agar pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh informasi serta paham terkait adanya pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung. Dengan itu, pada proses pelaksanaan pelayanan publik dengan *e-government* dapat digunakan oleh masyarakat secara optimal dan pemerintah dinilai baik dalam

memberikan pelayanan publik. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam rangka memberikan informasi mengenai Pindang Cemplung kepada pemerintah dan masyarakat telah dilakukan melalui sosialisasi langsung, melalui media sosial, selebaran, dan baliho yang disebar. Kegiatan sosialisasi tentang website Pindang Cemplung dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Subkor SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sosialisasi yang dilakukan oleh disdukcapil yaitu sebagai berikut:

*“Awalnya setiap tahun pasti ada bentuk sosialisasi kepada masyarakat entah itu di undang atau menyelenggarakan sendiri. Biasanya ada di tingkat kecamatan lalu mengumpulkan RT RW atau dari organisasi yang ada di masyarakat (PKK dan organisasi tingkat kabupaten) kemudian sosialisasi melalui radio, media sosial dan talkshow). Membuat selebaran dan baliho yang dicetak yang bisa dibagikan kepada masyarakat yang ditempel di balai desa, kantor kecamatan, atau di depan kantor Disdukcapil. Terakhir dilakukan sosialisasi di Kelurahan Demaan, Disdukcapil diundang untuk menyampaikan informasi secara umum mengenai administrasi kependudukan secara umum tetapi didalamnya diselipkan sosialisasi pindang cemplung.” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)*

**Gambar 3.** Sosialisasi Pindang Cemplung Secara Langsung dan Melalui Media Sosial



Sumber :Dokumentasi Disdukcapil Jepara dan Olanhan Peneliti

Di sisi lain, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara memang sudah memberikan sosialisasi terkait pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung. Tetapi, sosialisasi tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang telah menggunakan website Pindang Cemplung bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Disdukcapil.



Didukung dengan hasil wawancara dari Perencana Ahli Muda/Subkor Pemerintahan, sebagai berikut:

*“Disdukcapil telah melaksanakan sosialisasi tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemudian juga ketika ada momen acara misal ada acara hari olahraga biasanya disitu ada Disdukcapil langsung gabung sebagai salah satu bentuk sosialisasi.” (Hasil Wawancara, 16 Februari 2024).*

## 2. Capacity (Kemampuan Atau Keberdayaan)

Elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-government* terkait menjadi kenyataan. Terdapat tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*; dan
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

Kepercayaan Harus diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya. (Indrajit, 2006)

Pada penelitian ini, kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah yang dimaksudkan adalah kemampuan atau keberdayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Terdapat tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;

Anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan melalui website Pindang Cemplung sudah cukup dan terpenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tetapi dengan catatan setiap tahun akan dilakukan evaluasi agar Pindang Cemplung berjalan dengan optimal. Hal tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang selama dua tahun terakhir memberikan dana untuk pelaksanaan Pindang Cemplung. Sebagaimana

seperti yang disampaikan saat wawancara dengan Subkor SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yaitu:

*“Sumber dana untuk pengembangan Pindang Cemplung pada awalnya berasal dari pusat yaitu APBN khususnya pada tahun 2019-2020 dan juga dibantu oleh APBD. Berbeda dengan tahun ini dan tahun kemarin yaitu 2022-2023, semua dana tidak lagi berasal dari APBN tetapi murni dibiayai oleh APBD.” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)*

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan inovasi Pindang Cemplung diwajibkan untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai agar pelaksanaannya berhasil dan mencapai tujuan. Sebaliknya, jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tidak dapat menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, maka pelaksanaan Pindang Cemplung akan terkendala dan tidak berjalan secara optimal.

Hasil wawancara peneliti dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara terkait dengan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung sudah memadai. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan Subkor SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai berikut:

*“Terkait dengan infrastruktur teknologi dan informasi untuk pelaksanaan e-government pindang cemplung spesifikasinya pertama tentunya memerlukan server, storage server (media penyimpanan) karena yang di upload itu gambar lebih kearah pengadaan untuk storage server (media penyimpanan) untuk gambar-gambar yang di upload masyarakat melalui aplikasi Pindang Cemplung. Selain itu, jaringan didukung Diskominfo, sarana prasarana seperti komputer, printer, laptop didukung dari APBD.”(Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyediakan infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung dengan baik dan optimal seperti adanya server, storage server, jaringan, komputer, printer, laptop yang dapat mendukung terlaksananya website Pindang Cemplung dengan optimal. Disamping itu, ketersediaan infrastruktur teknologi di kalangan masyarakat sudah mendukung dalam penggunaan website Pindang Cemplung

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan

Aspek kemampuan atau keberdayaan pemerintah yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang berkompetensi sesuai dengan bidang teknologi informatika sangat dibutuhkan dalam pelayanan

administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung. Pada penelitian ini, untuk mengetahui ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan memiliki keahlian dalam menjalankan website Pindang Cemplung berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian, sebagai berikut:

*“Kompetensi serta keahlian yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang melaksanakan website Pindang Cemplung yaitu harus paham dan ahli IT, karena setiap harinya harus bergelut dengan jaringan komunikasi data. Jadi kalau jaringan komunikasi datanya tidak lancar kita tidak bisa kerja. Misal ada gangguan di server SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pusat, kita tidak bisa kerja. Atau mungkin dari Diskominfo yang ada trouble juga tidak bisa kerja. Jadi website yang membuat adalah Disdukcapil, untuk bisa dipakai harus mendapat persetujuan dari Diskominfo dilihat dari keamanannya, dilihat dari segi bantuan hackernya, dan dilihat dari segi kapasitas servernya. Diskominfo Kabupaten Jepara melakukan hal tersebut karena selaku pemegang tunggal kebutuhan internet di semua OPD di Kabupaten Jepara.” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)*

**Tabel 1.** Tim Penyelenggara Pindang Cemplung

No.	Nama	Posisi
1.	Putri Setianingrum, S.Kom	Admin utama Pindang Cemplung
2.	M. Alfian Fahrurnizar, S.Kom	Admin utama Pindang Cemplung
3.	Ulin Nuha, S.Kom	Penanganan Pindang Cemplung

Sumber: Data Disdukcapil Jepara, 2024

Selanjutnya, susunan tim koordinasi pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai berikut:

**Tabel 2.** Susunan Tim Koordinasi Pindang Cemplung

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Kepala Bidang	1
3.	Sub Koordinator	2
4.	Admin Instansi	2
5.	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)	9

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, 2024)

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ketersediaan dan kemampuan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai. Sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yaitu harus mengetahui IT. Untuk meningkatkan kemampuan serta pengalaman Disdukcapil telah melakukan bimbingan teknis kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan Pindang Cemplung dan diberikan informasi ketika ada perubahan kebijakan terkait

pelayanan adminduk. Tetapi, sumber daya manusia yang menangani Pindang Cemplung kebanyakan adalah THL (Tenaga Harian Lepas) yang tidak berstatus

sebagai ASN. Dan masih diperlukan beberapa sumber daya manusia sebagai verifikator untuk memverifikasi berkas yang masih kurang agar pelayanan administrasi kependudukan melalui Pindang Cemplung bisa lebih cepat lagi.

### 3. Value (Manfaat)

Tindakan Elemen pertama dan elemen kedua adalah dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi jasa (*supply side*). Apabila tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep e- Government, maka beragam inisiatif *e-government* tidak akan berguna. Dalam hal ini, yang menjadi penentu atas besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukan kalangan pemerintah sendiri melainkan masyarakat dan mereka yang memiliki kepentingan (*demand side*). Dengan demikian, pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang dirasakan oleh masyarakatnya secara signifikan. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat justru akan menghadirkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin menyulitkan meneruskan usaha pengembangan konsep *e-government*. (Indrajit, 2006)

Pada elemen ini, peneliti membahas tentang manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jepara dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara. Pembahasan pada elemen *value* dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan dan manfaat bagi pemerintah sebagai pemberi layanan. Manfaat pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung bagi masyarakat salah satunya dapat dilihat dari total pengajuan yang masuk pada pelayanan administrasi kependudukan melalui Pindang Cemplung. Dari awal diluncurkannya website Pindang Cemplung pada Agustus 2022 sampai dengan Januari 2024, terdapat sebanyak 11.921 pengajuan pelayanan administrasi kependudukan yang masuk. Berdasarkan pernyataan di atas, didukung dengan laporan rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan Pindang Cemplung sebagai berikut:

Elemen pertama dan elemen kedua adalah dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi jasa (*supply side*). Apabila tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep e-Government, maka beragam inisiatif *e-government* tidak akan berguna. Dalam hal ini, yang menjadi penentu atas besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukan kalangan pemerintah sendiri melainkan masyarakat dan mereka yang memiliki kepentingan (*demand side*). Dengan demikian, pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang dirasakan oleh masyarakatnya secara signifikan. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat justru akan menghadirkan bumerang bagi pemerintah yang akan

semakin menyulitkan meneruskan usaha pengembangan konsep *e-government*. (Indrajit, 2006)

Pada elemen ini, peneliti membahas tentang manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jepara dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara. Pembahasan pada elemen *value* dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan dan manfaat bagi pemerintah sebagai pemberi layanan. Manfaat pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung bagi masyarakat salah satunya dapat dilihat dari total pengajuan yang masuk pada pelayanan administrasi kependudukan melalui Pindang Cemplung. Dari awal diluncurkannya website Pindang Cemplung pada Agustus 2022 sampai dengan Januari 2024, terdapat sebanyak 11.921 pengajuan pelayanan administrasi kependudukan yang masuk. Berdasarkan pernyataan di atas, didukung dengan laporan rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan Pindang Cemplung sebagai berikut:

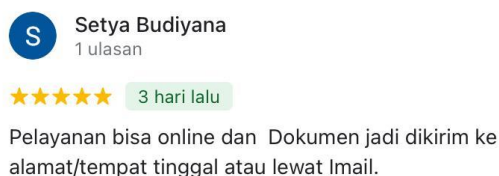
**Tabel 4.** Rekapitulasi Pelayanan Pindang Cemplung Tahun 2022-2024

Bulan	Total	Akta lahir baru	Akta Kematian	Pindah Datang	Pindah Keluar	KIA	Akta Lahir Terlambat	Akta Revisi	KTP
2022-08	436	143	98	0	0	0	139	56	0
2022-09	1808	724	298	0	0	0	585	201	0
2022-10	2618	822	283	86	89	48	1097	183	10
2022-11	2894	658	295	142	129	118	1334	204	14
2022-12	2897	738	421	171	154	89	1052	248	24
2023-01	3548	878	520	187	158	70	1334	319	82
2023-02	2928	775	434	155	135	105	1068	244	12
2023-03	2544	810	340	96	111	86	901	187	13
2023-04	1583	560	220	58	59	21	527	134	4
2023-05	3080	974	389	136	163	99	1117	177	25
2023-06	2374	640	374	157	143	67	815	156	22
2023-07	2749	721	342	219	214	67	937	200	49
2023-08	2622	628	400	220	182	47	901	202	42
2023-09	2131	478	409	168	155	51	676	168	26
2023-10	2446	589	306	208	177	30	861	235	40
2023-11	1966	491	342	192	156	37	567	153	28
2023-12	1585	312	298	147	147	29	505	134	13
2024-01	1268	227	254	120	112	16	394	121	24

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara, 2024)

Kemudian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait adanya website Pindang Cemplung juga dinilai mempermudah proses pelayanan tidak harus ke kantor Disdukcapil karena bisa mengurus pelayanan dari rumah tetapi masih diperlukan lagi sosialisasi yang menyeluruh terkait tutorial penggunaan website Pindang Cemplung.

**Gambar 5.** Ulasan Masyarakat terkait Pindang Cemplung



Sumber: Google Maps Disdukcapil Jepara, 2024

Selain itu, manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan berbasis *e-government* melalui website Pindang Cemplung yaitu menambah cakupan dokumen pendudukan, selain itu lebih mewujudkan validitas data berimbang pada pengambilan kebijakan, serta berdampak pada pengambilan kebijakan dari Bupati lebih bisa tepat sasaran. Dengan adanya website Pindang Cemplung perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara lebih terarah, terukur, dapat disinergikan, diintegrasikan, dikolaborasikan dengan semua program pemerintah dari beberapa tingkatan yaitu nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Keterlibatan masyarakat dalam Pindang Cemplung dinilai sangat partisipatif dilihat dari total layanan yang masuk cenderung naik tiap bulannya. Dengan adanya website Pindang Cemplung ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dari rumah dan tanpa datang langsung ke kantor Disdukcapil. Pindang Cemplung memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan, akan tetapi terdapat sosialisasi yang minim dan kurang merata dari Disdukcapil sehingga banyak masyarakat yang mengalami kebingungan dalam menggunakan website Pindang Cemplung. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan, terdapat beberapa kendala dalam menggunakan website Pindang Cemplung sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dirasakan oleh masyarakat seperti tiba-tiba error saat mengakses tetapi bisa ketika di *refresh*, kurangnya tata cara langkah dalam menggunakan website Pindang Cemplung, dan proses verifikasi dari Disdukcapil yang lama.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis e-Government Melalui Website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara Tahun 2023 dengan menggunakan teori hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government yang dikutip oleh Indrajit (2016) terdapat tiga elemen yaitu *Support* (Dukungan), *Capacity* (Kemampuan) dan *Value* (Manfaat). Pada elemen *Support* (Dukungan) pemerintah yaitu meliputi telah adanya kebijakan website Pindang Cemplung sudah mendukung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melakukan sosialisasi

mengenai website Pindang Cemplung tetapi sosialisasi tersebut belum sepenuhnya optimal dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat. Selanjutnya Pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai salah satu kunci sukses dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Jepara. Telah dibangunnya infrastruktur dan superstruktur dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung sudah terlaksana dengan baik karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyediakan berbagai infrastruktur dan sudah terdapat peraturan sebagai dasar hukum pembuatan dan penyelenggaraan dari Pindang Cemplung. Peraturan hukum yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Pada elemen Capacity (Kemampuan atau Keberdayaan Dari Pemerintah) dalam menyediakan anggaran susah memadai. Infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung dengan baik dan optimal. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi di masyarakat juga sudah mendukung dalam menggunakan website Pindang Cemplung. Ketersediaan dan kemampuan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai. Sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yaitu harus mengetahui IT. Dibutuhkan lebih banyak lagi sumber daya manusia pada bagian verifikator. Kemudian pada elemen Value (Manfaat), pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Manfaat bagi pemerintah menambah cakupan dokumen pendudukan, selain itu lebih mewujudkan validitas data berimbas pada pengambilan kebijakan, serta berdampak pada pengambilan kebijakan dari Bupati lebih bisa tepat sasaran. Kemudian website Pindang Cemplung berdampak pada perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara lebih terarah, terukur, dapat disinergikan, diintegrasikan, dikolaborasikan dengan semua program pemerintah. Manfaat bagi masyarakat dapat mempermudah proses pelayanan tidak harus ke kantor Disdukcapil karena bisa mengurus pelayanan dari rumah dan mempercepat dalam pelayanan administrasi kependudukan dibandingkan sebelum adanya website Pindang Cemplung.

## Referensi

Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong*:

- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).*
- Azizah, N. (2016). Ir-perpustakaan universitas airlangga. *Ir-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA*, (2019), 12–31.
- DWITA, P. B. (2022). Implementasi Prinsip Check And Balance Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Bukit Kemuning Dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52. doi:10.56087/aijih.v23i1.35
- Hajar, S. (2021). *Pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik* (Vol. 1). umsu press. Retrieved from <http://umsupress.umsu.ac.id>
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Moha, I. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif.
- Nasir, M. (2022). Meraih Kinerja Pegawai Melalui Disiplin Jam Kerja, 4(1), 12–25.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Pendi. (2017). Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 5, 6119–6128.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44-58.
- Sudirman, F. A. (2023). Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dan Sdgs: Review Literatur Sistematis. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 8(2), 273-288.
- Sadiyah, A. H. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Dawuan Kabupaten Majalengka). FKIP UNPAS.
- SARI, T. P. (2021). Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa, (July), 4.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan



Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85.  
doi:10.54783/ap.v3i1.11